



# PROFIL PENGARUSUTAMAAN GENDER 2024



BAGIAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN ADMINISTASI PEMBANGUNAN  
Sekretariat Daerah Kota Surabaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah

. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 09 Juli 2024

Kepala Bagian Pengadaan Barang  
Jasa dan Administrasi Pembangunan

ALY MURTADLO, S.ST., MM  
Pembina / IV/a  
NIP. 197704092001121002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	xx
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	xx
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	xx
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	xx
BAB VI. PENUTUP	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor

3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).

8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.

9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.

10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya

11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024

Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya

### **1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)

2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi

3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024

4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

Pada awalnya sebelum adanya Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP) adalah instansi/badan yang bernama Bina Program (2005), kemudian berganti lagi pada tahun 2017 menjadi Administrasi Pembangunan, seiring dengan penetapan otonomi daerah pada tahun 2022 – sekarang menjadi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP) Kota Surabaya

#### **2.2 Visi, Misi dan Motto**

##### **a. Visi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Kota Surabaya memiliki visi :

**Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan**

##### **b. Misi**

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

#### **2.3 Demografi**

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP) Kota Surabaya terletak di dua lokasi yaitu Jalan Jimerto No. 25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272, Indonesia (Kantor Administrasi Pembangunan) dan Jalan Sedap Malam No. 1, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272, Indonesia (Kantor Pengadaan Barang dan Jasa). Letak Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan

Administrasi Pembangunan (BPBJAP) Kota Surabaya sangat strategis karena berada di wilayah Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, dan Alun-Alun Kota Surabaya yang sekaligus dapat melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan langsung terhadap kegiatan operasional pengadaan tersebut

**Gambar**  
**Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi**  
**Pembangunan (BPBJAP) Kota Surabaya**



Sumber: Renstra Sekda 2016-2021

## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan tertuang Pada Keputusan Walikota Nomor : 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;

### 2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dilingkungan Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, dibutuhkan sosialisasi PUG kepada pegawai di lingkungan Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan pokok bahasan antara lain:

- Sosialisasi PUG, kebijakan PUG, dan Focal Point;
- Pendampingan dan review penyusunan dokumen perencanaan penganggaran Responsif Gender.

Data pendukung sebagaimana link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JYPhi-yzfyBbwyyTGrswRoTEVS6yqzQB>

### **2.4.3 SDM Terlatih PUG**

#### **A. SDM terlatih PUG di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut**

Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan yang Terlatih PUG sebanyak 2 orang, dengan jumlah pegawai seluruhnya 93 orang, dengan prosentase sebesar 2 %.

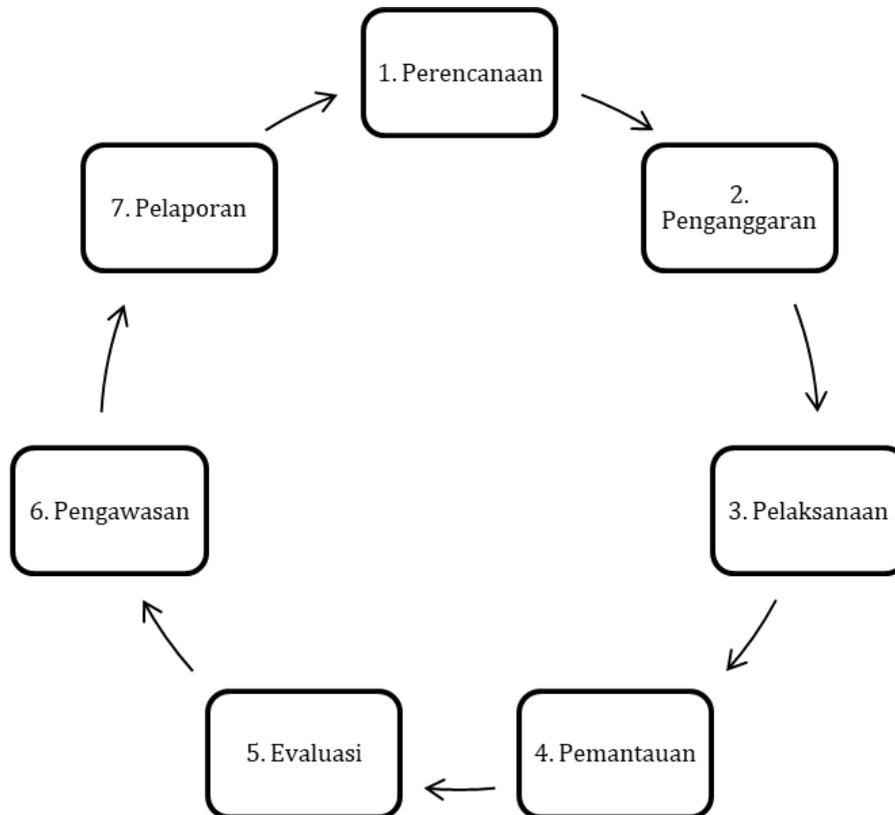
### **2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya**

**Sesuaikan template dan boleh dilengkapi Format Data terpilah**

<https://drive.google.com/drive/folders/1CUImUI4AsKxcJEeyWhyiF13xHERFwkoh>

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI**  
**PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



**3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

## **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor: 400.2/491/436.7.13/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2024.

b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Responsif Gender Sebagai bentuk keberlanjutan dari Renstra sebelumnya yang terdapat Tujuan, Sasaran, Program terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 yang diwujudkan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan

Isu-isu gender dalam isu-isu strategis dinas :

- 1) peningkatan kemampuan TIK perangkat pemerintahan dan masyarakat;
- 2) diseminasi informasi;
- 3) penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) penyediaan infrastruktur TIK;
- 5) keamanan informasi.

Link dokumen Restra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut  
<https://drive.google.com/drive/folders/1CUImUI4AsKxcJEeyWhyiF13xHERFwkoh>

c. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)

Terdapat 3 Sub Kegiatan yang memberi manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan pada tahun 2024 sebagai berikut :

- 1 Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa
- 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

d. Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR). Terdapat 3 kegiatan tahun 2024 di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan yang telah disusun GAP, GBS dan TORnya. Data dukung sebagaimana link berikut :

<https://drive.google.com/drive/folders/1CUImUI4AsKxcJEeyWhyiF13xHERFwkohPbX?usp=sharing>

#### e. Alat Analisis Gender

Alat dan Tehnik Analisis Gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu:

Langkah ke-1 : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan;

Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif;

Langkah ke-3 : Mengenal Isu kesenjangan gender;

Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal);

Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal);

Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan;

Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi;

Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar);

Langkah ke-9 : Indikator gender.

## **2. Penganggaran yang Responsif Gender**

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

b. Regulasi/kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian

Visi Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan

i. RPJMD Kota Surabaya 2021-2026;

ii. Renstra Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan 2021-2026;

iii. Renja Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan ;

iv. Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan

v. GAP, GBS, TOR.

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34**  
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.932.518.626,-
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	860.057.025,-
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	331.200.000,-
4		
5		
6		
7		
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	5.123.775.651,-

### 3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Juknis sblmnya)

- a. Output yang mendukung pemberdayaan perempuan (politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya)

No.	Bidang	Kegiatan
1	Politik	Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan; Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender; Melibatkan perempuan dalam proses pengawasan kebijakan dan program yang berkaitan dengan anggaran responsif gender
2	Ekonomi	Mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan seperti pelatihan dan keterampilan, promosi UMKM yang dimiliki perempuan; Melaksanakan analisis gender pada anggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan tersedia
3	Sosial	Menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk perempuan agar memiliki keterampilan dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan ekonomi;

		Melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat; Membangun jaringan layanan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk didalamnya terdapat layanan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk didalamnya terdapat layanan konsultasi dan terapi
4	Hukum	Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukum perempuan serta mekanisme perlindungan yang ada; Memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesetaraan gender, bekerjasama dengan lembaga hukum untuk memberikan akses bagi perempuan yang membutuhkan bantuan hukum
5	Lainnya (Budaya dan Lingkungan)	Mendorong penggunaan inovasi teknologi digital untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan seperti akses informasi, pasar, dan lain-lain; Mendorong perubahan norma dan kultur yang merugikan perempuan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran kesetaraan gender; Memastikan perempuan berperan dalam program-program lingkungan diantaranya adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

a. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdapat di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan antara lain Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan yang aktif

ikut serta meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang hak-hak perempuan, dan dukungan untuk usaha mikro.

b. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan pembentukan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, yang secara aktif memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, pelatihan keterampilan bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, serta bekerjasama menerapkan sistem monitoring untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

c. Ketersediaan Layanan Bagi Perempuan dan Anak di Internal PD dan Jejaring

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan diakomodir dalam bentuk penyediaan fasilitas umum ramah perempuan dan anak yang bisa diakses untuk laki-laki, perempuan dan anak. Contohnya antara lain pemisahan toilet laki-laki dan perempuan

d. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan diakomodir dalam bentuk kegiatan pelatihan Dharma Wanita yang memberikan wawasan dan keterampilan bukan saja bermanfaat untuk personal tapi juga untuk peningkatan kualitas keluarga. Contohnya antara lain pelatihan make-up, parenting, dan lain sebagainya

e. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Salah satu implementasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas keluarga dengan membentuk Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan yang merupakan wadah aspirasi, kreasi dan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan esensi positif dalam kehidupan bermasyarakat

f. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan yang Mengintegrasikan Perspektif Gender

Salah satu program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender adalah mewujudkan sistem pelayanan prima yang ramah perempuan dan anak dengan berbasis digitalisasi

g. Data Angka Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Berdasarkan data yang ada, untuk saat ini tidak ditemukan kasus kekerasan perempuan di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan. Hal ini linier dengan komitmen Pemerintah Kota Surabaya yang perhatian terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak.

h. **Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender memastikan semua pihak, tanpa memandang gender, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang aman dan nyaman berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing.

No	Jenis Sarana	Ada/Tidak	Kondisi
1	Toilet laki-laki dan perempuan	Ada	Baik dan terawat
2	Ruang laktasi	Ada	Baik dan terawat
3	Jalur kursi roda	Ada	Baik dan terawat
4	Sarana dan prasarana penunjang (APAR, titik kumpul dan jalur evakuasi, tempat sampah)	Ada	Baik dan terawat

i. **Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan Jejaring**

Pembinaan Pengarusutamaan Gender di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk GAP, GBS, dan TOR.

**b. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diatur dalam Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2/124/436.3.1/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

**c. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan bukan saja melibatkan unsur internal Perangkat Daerah, tapi juga melibatkan unsur dari eksternal Perangkat Daerah. Adanya monitoring dan evaluasi dari Tim Anggaran Pemerintah

**d. Pelaporan**

3. Pelaporan Pengarusutamaan Gender mengacu pada Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2/124/436.3.1/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. Pelaporan Pengarusutamaan Gender

diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP, GBS, dan TOR beserta Profil Gender Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan.

**BAB IV**

**TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER  
KOTA SURABAYA**

**4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)**



**4.2 Kesimpulan**

- a. Perlunya memperbanyak pelatihan dan pemahaman tentang isu gender di antara pegawai Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan agar tingkat kemampuan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan keuangan meningkat
- b. Perlunya dukungan yang tak terbatas atas kebijakan yang mendukung Pengarusutamaan Gender karena kebijakan yang ada sekarang belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting terkait gender
- c. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk melacak dan menilai dampak dari program-program Pengarusutamaan Gender agar tidak menjadi kendala dalam perbaikan berkelanjutan

**4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

Yang sudah dilaksanakan :

- a. Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender
- b. Membentuk sistem monitoring yang kuat untuk mengukur efektivitas dari program yang telah dilaksanakan
- c. Alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender
- d. Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif gender dengan melakukan panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- e. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang isu gender

Rekomendasi / saran :

- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan. Rutin mengadakan pelatihan terkait perspektif

gender untuk seluruh pegawai Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan termasuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil.

b. Komitmen anggaran yang berkelanjutan dengan memastikan adanya anggaran yang tepat untuk program-program gender, dengan penilaian berkala terhadap penggunaan anggaran tersebut

c. Menyusun kebijakan yang lebih jelas dan tegas dalam mengintegrasikan aspek gender ke dalam kebijakan dan program

d. Penerapan sistem monitoring yang efektif dengan membuat indikator yang jelas dan dapat diukur untuk menilai dampak dari setiap program yang dilaksanakan, serta menggunakan data untuk perbaikan berkelanjutan dan terus-menerus

## **BAB V**

### **INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

#### **5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Daerah Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

a. Delivery

Aplikasi berbasis website untuk mempermudah pegawai dan penyedia melakukan pengadministrasian dalam proses pengadaan barang jasa

b. SKM

Aplikasi berbasis website untuk menjangkau kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan di Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan

Lampiran

1. SK PUG Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
  - Kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender didalam internal Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
  - Musrenbang Melibatkan Unsur Perempuan Termasuk Organisasi Perempuan Dan Anak
  - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah (UMKM atau lainnya)
  - Foto/ Dokumentasi Kegiatan Responsif Gender Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
    - Kegiatan pelayanan surat-menyurat
    - Kegiatan fasilitasi makanan-minuman
    - Kegiatan fasilitasi sarana-prasarana

Dengan link sebagaimana berikut :

<https://drive.google.com/drive/folders/1oiUuD16WBag4-tIaW-R0oXm0TgZySjwM>

- Bukti dukung inovasi penyelenggaran PUG yang telah berdampak positif untuk masyarakat yang dihasilkan selama 1-2 tahun terakhir

Dengan link sebagaimana berikut :

[https://drive.google.com/drive/folders/1TFv7F357NqInMN3IvWvHGjVj2r71mKM?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1TFv7F357NqInMN3IvWvHGjVj2r71mKM?usp=drive_link)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024

